



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI, BKKBN, BADAN POM, ASKES, JAMSOSTEK, BNP2TKI DAN
DJSN)**

Tahun Sidang : 2009-2010
Masa Persidangan : II
Jenis : Rapat Dengar Pendapat
Dengan : 1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
2. Balai Besar/Balai POM seluruh Indonesia.
Sifat : **Tertutup**
Hari, tanggal : Senin, 1 Maret 2010
Waktu : Pukul 14.00 WIB - selesai
Ketua Rapat : Drs.H. Irgan Chairul Mahfiz/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris : Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag. Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I
Jln. Jend. Gatot Subroto Jakarta
Acara : Membicarakan usulan APBNP berdasarkan kondisi Badan
POM, Balai Besar POM dengan justifikasi dan skala prioritas.
Jumlah kehadiran : Anggota dari 45 Anggota Komisi IX DPR RI,
orang Ijin,

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Balai Besar/Balai POM seluruh Indonesia dibuka pukul 14.30 WIB dan sesuai Peraturan Tertib Pasal 245 ayat (1) Rapat dinyatakan *tertutup* untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menyampaikan paparan sebagai berikut :
 - a. Ada 5 isu strategis yang dihadapi oleh BPOM pada saat ini, antara lain :

- Kurangnya peralatan laboratorium untuk memenuhi standar minimal Laboratorium di 30 Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia. Penambahan anggaran sebesar Rp. 350.000.000.000,- akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan peralatan di 30 Balai Besar/Balai POM sesuai dengan skala prioritas masing-masing Balai Besar/Balai POM.
 - Perlunya perkuatan laboratorium keliling di 30 Balai Besar/Balai POM. Untuk pemenuhan kebutuhan penurunan penggunaan bahan berbahaya dalam pangan jajanan anak sekolah, yang dampaknya terjadi keamanan pangan dibutuhkan penambahan anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000,-
 - Perlunya perkuatan pemenuhan standard dan persyaratan cara pembuatan obat yang baik (CPOB) bagi sarana produksi kosmetika dalam rangka menghadapi ACFTA. Penambahan anggaran dalam rangka harmonisasi ASEAN sebesar Rp. 30.000.000.000,- terdiri dari Rp. 20.000.000.000,- di bidang obat dan Rp. 10.000.000.000,- untuk harmonisasi di bidang kosmetika.
 - Optimalisasi sistem pelayanan publik *online* untuk menunjang penerapan INSW dalam rangka ACFTA dan peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan obat dan makanan. Penambahan anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000,- akan digunakan untuk perkuatan infrastruktur dalam menghadapi ACFTA, membangun sistem informasi terintegrasi antara pusat dan Balai POM, pengadaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk 4 Balai POM baru, pengembangan sistem informasi publik melalui website dan pengembangan kapasitas SDM.
 - Perkuatan pengamanan pasar dalam negeri dari produk obat dan makanan ilegal. Penambahan anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000,- akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : pengadaan *tool kit* penyidikan tindak pidana obat dan makanan, pembentukan sistem informasi tindak pidana obat dan makanan, penertiban obat dan makanan ilegal, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan-pelatihan, forum koordinasi peningkatan kinerja PPNS, Workshop-workshop nasional dengan lintas sektoral terkait untuk memperkuat kerjasama dengan penegak hukum lain.
2. Menghadapi pemberlakuan *Asean China Free Trade Agreement* (ACFTA), BPOM diharapkan dapat menerapkan strategi yang tepat diantaranya melalui bentuk kerjasama optimalisasi pengawasan obat dan makanan serta meningkatkan pelayanan publik *online*.
 3. Maraknya produk minuman energi disinyalir berdampak buruk bagi kesehatan. BPOM harus melakukan langkah-langkah antisipasi dengan melakukan pengujian terhadap produk yang telah beredar di masyarakat dan lebih meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat.
 4. Berkenaan dengan larangan penggunaan Bahan Kimia Obat (BKO) sebagai bahan baku dalam industri jamu, BPOM diharapkan dapat melakukan advokasi dan penegakan hukum dengan tegas, agar industri jamu skala kecil dapat tetap hidup dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
 5. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Komisi IX DPR RI disarankan melakukan Sidak ke beberapa Balai Besar POM/Balai POM diutamakan di wilayah yang bermasalah.



6. Berkaitan dengan rencana donasi vaksin dan obat oleh WHO, BPOM diharapkan dapat memeriksa vaksin dan obat tersebut sebelum beredar di masyarakat dan menolak vaksin/obat yang kadaluarsa. BPOM diharapkan dapat berkoordinasi dengan Kemkes untuk dapat segera merevisi ketentuan/peraturan yang mengatur tentang donasi vaksin dan obat dari luar negeri, sehingga BPOM dapat melakukan pemeriksaan terhadap donasi obat dari luar negeri.

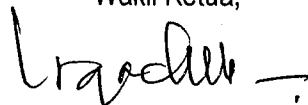
III. KESIMPULAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan POM dan Kepala Balai Besar POM se Indonesia pada hari ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Komisi IX DPR RI menerima dan mendukung usul APBN-P BPOM RI Tahun 2010 serta menugaskan kepada anggota Komisi IX DPR RI yang duduk di Badan Anggaran DPR RI untuk memperjuangkan realisasi dari usulan tersebut dalam Rapat Badan Anggaran DPR RI.
2. Komisi IX DPR RI meminta Badan POM RI untuk membuat skala prioritas dalam pemenuhan kebutuhan peralatan laboratorium (Balai Besar POM, Balai POM dan laboratorium keliling) yang secara nyata memberikan manfaat dalam pengawasan obat dan makanan untuk melindungi masyarakat.
3. Komisi IX DPR RI akan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja BPOM dengan melakukan kunjungan/inspeksi langsung ke beberapa Balai Besar POM/Balai POM terutama di wilayah yang bermasalah (perbatasan, tempat-tempat perdagangan bebas dan lain-lain).

Rapat diakhiri pukul 16.45 WIB.

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI
Wakil Ketua,



Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ